

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pembangunan ekonomi, politik, dan sosial menjadi semakin global dan saling terkait antara satu negara dan lainnya. Kecenderungan tersebut semakin menguat sampai abad 21 ini, terutama karena pengaruh teknologi dan modal.¹ Siasat atau perencanaan ekonomi termasuk dalam politik ekonomi, yang merupakan pilihan politik dari suatu negara dan masyarakatnya. Politik ekonomi merupakan siasat atau cara untuk melaksanakan kebijakan ekonomi suatu negara berdasarkan pilihan politiknya. Semua usaha melaksanakan politik ekonomi tersebut tidak lepas dari basis teori ekonomi yang bisa menjadi titik terang menuju tingkat kemakmuran masyarakat yang lebih tinggi dan lebih meluas.²

Ekonomi politik paling tidak telah memberi kontribusi bagi studi Hubungan Internasional dalam konteks posisi subjek menyangkut dua aspek: *explanatory* dan *normative*, yaitu berusaha menjelaskan mengenai hubungan timbal balik pemahaman baru dari realitas sosial, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah (*The economic of public policy*) menyangkut keputusan-keputusan politik maupun perubahan ekonomi oleh pemerintah, ekonomi politik ternyata cukup handal (*reliability*) yakni cara menghasilkan pengetahuan atau metode untuk membuat pengetahuan untuk menjelaskan konsep-konsep atau bahkan mengetengahkan teori-teorinya yang berusaha

1 Daniel Bell, Sosiolog Harvard University dalam Rachbini, Didik J. 2004. *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan (Edisi I)*. Hlm. 145. Jakarta: Granit.

2 Moch Hatta dalam Rachbini, Didik J. 2004. *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan (Edisi I)*. Hlm. 179. Jakarta: Granit.

menerangkan perilaku ekonomi beserta mekanismenya melalui pemahaman implikasi politik baik berupa strategi dan kebijakan-kebijakan (*policies*) dan/atau tindakan-tindakan (*actions*) di lapangan yang dilakukan oleh masyarakat negara atau internasional dalam berbagai interaksi dunia.³

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu hal yang penting dalam sebuah negara. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi akan menggambarkan bagaimana negara tersebut berusaha meningkatkan kesejahteraan manusia di dalam lingkup negara tersebut. Tingkat kesejahteraan tersebut dapat diukur dengan melihat angka Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Semakin tinggi PDB per kapita, maka semakin sejahtera masyarakat negara tersebut. Perekonomian sebuah negara harus terus tumbuh dan harus lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan penduduk agar PDB per kapita terus meningkat. Sebagai contoh, jika pertumbuhan penduduk suatu negara adalah 2% pertahunnya, maka pertumbuhan PDB harus lebih besar dari 2% per tahun.

Pertumbuhan ekonomi sebuah negara dikaji dalam ilmu ekonomi makro yang membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, termasuk membahas inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah (misalnya perubahan tingkat pajak) terhadap hal-hal tersebut. Terdapat berbagai permasalahan dalam pengembangan ekonomi makro dalam sebuah negara, yakni kemiskinan dan pemerataan, krisis nilai tukar, hutang luar negeri, perbankan, kredit macet, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta pengangguran. Di sinilah pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara karena dapat mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pengurangan angka kemiskinan,

³ Mas'oed, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik : Orde Baru. 1966-1971* Jakarta: LP3ES.

peningkatan *output* nasional menjamin masyarakat dapat menikmati lebih banyak barang dan jasa. Untuk negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi dapat memungkinkan standar hidup yang jauh lebih baik. Sebagai contoh, pada abad kesembilan belas, kemiskinan absolut tersebar luas di Eropa, satu abad pertumbuhan ekonomi telah mengangkat hampir semua orang keluar dari kondisi kemiskinan ini. Pertumbuhan ekonomi sangat penting di negara berkembang.

Keadaan pertumbuhan ekonomi yang terus bertahan dalam angka tertentu akan menciptakan keadaan stabilitas ekonomi yang baik dalam sebuah negara. Stabilitas ekonomi adalah kondisi ekonomi dimana tidak terjadi perubahan yang terlalu besar atau fluktuasi dalam permasalahan makroekonomi. Ekonomi yang stabil dapat dilihat dari ekonomi yang pertumbuhan outputnya tetap, tidak memiliki inflasi tinggi atau mengalami banyak perubahan, serta tidak sering mengalamai resesi. Ekonomi yang stabil memungkinkan kondisi ekonomi yang baik seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran.

Nepal termasuk sebagai salah satu negara miskin-berkembang. Nepal sangat sering menghadapi krisis perekonomian makro berupa kemiskinan dan inflasi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Nepal berjalan sangat lambat namun dapat dikatakan stabil di setiap tahunnya. Nepal membutuhkan banyak pertumbuhan produksi untuk menunjang ekonomi dalam negaranya namun tidak didukung dengan kondisi iklim dan geografis serta sarana prasarana yang mendukung.⁴ Pada umumnya, negara-negara sedang berkembang memandang industri

⁴ Peter, Beek Van Der, dkk. 2006. *Late Miocene- Recent Exhumation of the Central Himalaya and Recycling in the Foreland Basin Assessed by Apatite Fission-Track Thermochronology of Siwalik Sediments, Nepal*. France. Hlm. 18, 413-434.

yang penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pandangan ini berdasarkan pada penelitian-penelitian empiris bahwa negara-negara yang telah maju dan kaya ternyata lebih banyak menekankan pada bidang industri, berbeda dengan negara-negara yang sedang berkembang lebih banyak menekankan pada sektor pertanian. Hal ini terlihat dari besarnya sumbangan sektor tersebut terhadap PDB negara yang bersangkutan. Kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang sektor industri memberikan sumbangan terhadap PDB hanya berkisar antara 20-30%. Ketika diadakan observasi peranan sektor industri terhadap PDB pada awalnya memang hanya menyumbangkan sebesar tersebut di atas, namun kedepannya ternyata telah terjadi peningkatan sekitar 40-50% dari seluruh produksi nasional.⁵

Kondisi iklim dan geografis Nepal tidak mendukung adanya sumber daya alam yang bisa diolah sebagai bahan dasar kebutuhan utama dalam suatu produksi, yaitu bahan bakar. Melihat segala keterbatasan penghasil bumi Nepal serta segala keterbatasan masyarakatnya dalam mengolah hasil bumi, Nepal akhirnya memutuskan untuk melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara di dunia yang dapat menyuplai kebutuhan produksi dalam negeri, utamanya dengan negara tetangganya yang paling dekat yakni India.

Hubungan bilateral antar negara menjadi sangat penting bagi suatu negara, karena di masa sekarang sangatlah tidak mungkin bagi suatu negara bertahan dengan tidak bergantung dengan negara lainnya. Melalui hubungan internasional, pencapaian tujuan negara akan lebih mudah dicapai dan perdamaian dunia lebih mudah diciptakan. Ketergantungan dalam hubungan antar negara terjadi di berbagai bidang kehidupan baik perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial maupun olah raga.

5 Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Hlm. 28. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Bergantinya sistem pemerintahan di Nepal sangat jarang menemui permasalahan yang menggoyahkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Nepal. Perubahan sistem pemerintahan Nepal yang sebelumnya tidak pernah berdampak besar pada sejumlah bidang baik ekonomi maupun bidang lainnya dalam negeri Nepal namun pada tanggal 21 September 2015, satu minggu setelah diadopsinya konstitusi demokrasi pada sistem pemerintahan Nepal, beberapa kelompok masyarakat mengadakan pemberontakan yang berujung rusuh hingga lebih dari 40 orang, sebagian besar merupakan pengunjuk rasa, tewas dalam sejumlah bentrokan dalam kontroversi seputar perubahan konstitusi Nepal.⁶ Kerusakan ini membawa hubungan diplomatik antara Nepal dan India merenggang. Sejak saat itu, pemerintah India memutuskan untuk menghentikan sementara hubungan perdagangannya dengan Nepal hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan. India yang telah disebutkan sebelumnya sebagai negara yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi Nepal menghentikan hubungan diplomasinya, hal inilah yang kemudian memicu munculnya krisis stabilitas ekonomi di Nepal pada tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian yang berjudul “Dampak Demokratisasi terhadap Stabilitas Ekonomi Nepal Tahun 2016” dan berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka penulis menarik sebuah rumusan masalah yaitu:

“bagaimana dampak demokratisasi terhadap stabilitas ekonomi di Nepal pada tahun 2016?”

⁶ BBC News. 2015. *UN: Nepal Blockade Puts Millions Of Children At Risk*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-34968252>. Diakses pada 12 Juli 2018.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam mengkaji pembahasan mengenai dampak demokratisasi terhadap stabilitas ekonomi di Nepal pada tahun 2016, penulis menggunakan teori pembangunan seimbang (*balanced growth theory*) yang dipelopori oleh seorang ekonom bernama Ragnar Nurkse dan konsep hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi oleh James A. Robinson, Seymour Martin Lipset, dan Guillermo Vuletin.

Teori Pembangunan Seimbang (*Balanced Growth Theory*)

Teori pertumbuhan seimbang berhipotesis bahwa pemerintah negara-negara terbelakang perlu melakukan investasi besar di sejumlah industri secara bersamaan.⁷ Hal ini akan membantu memperbesar ukuran pasar nasional maupun internasional, meningkatkan produktivitas, dan memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi.⁸ Ragnar Nurkse menekankan pertumbuhan ekonomi yang seimbang akan baik pada sektor industri dan pertanian dalam sebuah negara.⁹ Nurkse menyadari bahwa pertumbuhan dan keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri pembangunan diperlukan dalam sebuah negara sehingga masing-masing sektor ini dapat menyediakan pasar untuk produk-produk di sektor lainnya

⁷ Cypher, James M., dan James L. Dietz. 2008. *The Process of Economic Development (3rd Revised ed.)*. Hlm. 640. Routledge. ISBN 0-415-77104-8.

⁸ Hayami, Yujiro, dan Yoshihisa Gōdo. 2005. *Development economics: from the poverty to the wealth of nations (3, illustrated ed.)*. Hlm. 430. Oxford University Press. ISBN 0-19-927271-9.

⁹ Nurkse, Ragnar. 1961. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Hlm. 163. New York: Oxford University Press.

dan sebaliknya, menyuplai bahan baku yang diperlukan untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor yang lain.

Teori pembangunan ini membahas bagaimana pasar kecil di negara-negara *under developed* dapat mengembangkan negaranya serta mengklarifikasi berbagai faktor penentu ukuran pasar suatu negara yang menempatkan fokus utama pada produktivitas negara tersebut.¹⁰ Jika tingkat produktivitas meningkat di negara yang kurang berkembang, ukuran pasarnya akan meluas dan dengan demikian dapat menjadi negara dengan ekonomi yang maju.¹¹

Ukuran pasar sangat penting dalam menentukan tingginya investasi di suatu negara. Ragnar Nurkse merujuk pada karya Allyn A. Young yang menegaskan bahwa ketertarikan untuk berinvestasi ditentukan oleh ukuran pasar suatu negara.¹² Negara-negara terbelakang memiliki daya beli yang rendah.¹³ Daya beli yang rendah menerangkan bahwa pendapatan bersih masyarakat rendah, meskipun dalam hal moneter mungkin tinggi. Daya beli yang rendah juga menegaskan bahwa permintaan domestik untuk komoditas dominan rendah dalam konsumsi yang

¹⁰Gaur, K.D. 1995. *Development and Planning*. University of Michigan: Sarap & Sons. hlm. 820. ISBN 81-85431-54-X.

¹¹Cypher, James M., dan James L. Dietz. 2008. *The Process of Economic Development (3rd Revised ed.)*. Hlm. 640. Routledge. ISBN 0-415-77104-8..

¹²Mehrling, Perry G., dan Roger J. Sandilands. 1999. *Money and Growth: Selected Papers of Allyn Abbott Young*. Hlm. 464. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-19155-6.

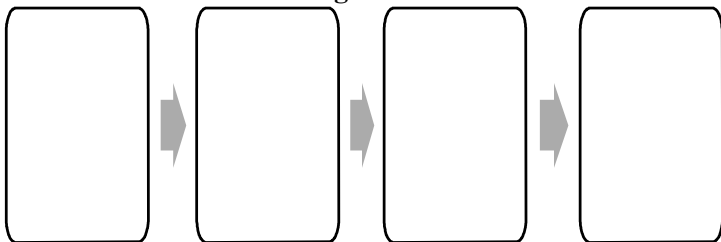
¹³S. K., Misra, dan V. K. Puri. 2010. *Economics Of Development And Planning—Theory And Practice (12th ed.)*. Nepal: Himalaya Publishing House. ISBN 81-8488-829-5.

mencakup barang dan jasa, serta termasuk permintaan modal.

“The limited size of the domestic market in a low income country can thus constitute an obstacle to the application of capital by any individual firm or industry working for the market. In this sense the small domestic market is an obstacle to development generally.”

Pernyataan Nurkse di atas menyatakan bahwa jumlah pasar domestik yang terbatas di negara berpenghasilan rendah dapat menjadi hambatan bagi penerapan modal oleh setiap perusahaan atau industri yang bekerja untuk pasar. Dalam hal ini pasar domestik kecil merupakan hambatan bagi pembangunan secara umum.¹⁴ Hal ini secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3.1
Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi
Ragnar Nurkse



Proses mengembangkan pasar dalam negeri yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan suatu negara ditentukan oleh beberapa

¹⁴Nurkse, Ragnar. 1961. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Hlm. 163. New York: Oxford University Press.

faktor yakni *money supply*, populasi, geografis, biaya transportasi dan hambatan perdagangan, promosi penjualan, dan produktifitas. Dalam hal *money supply*, Nurkse menyimpulkan bahwa hanya meningkatkan pasokan uang tidak akan memperluas pasar tetapi pada kenyataannya akan menyebabkan tekanan inflasi dalam suatu negara. Selanjutnya Nurkse menentang gagasan bahwa populasi besar menyiratkan pasar yang besar.¹⁵ Meskipun negara-negara terbelakang memiliki populasi yang besar, tingkat produktivitas mereka rendah. Hal ini menyebabkan tingkat pendapatan per kapita yang rendah yang lebih lanjut menimbulkan angka pengeluaran konsumsi rendah, dan tabungan sangat rendah atau sama sekali tidak ada. Di sisi lain, negara-negara maju memiliki populasi yang lebih kecil daripada negara-negara terbelakang tetapi berdasarkan tingkat produktivitas yang tinggi, pendapatan riil per kapita lebih tinggi dan lebih lanjut dapat menciptakan pasar yang besar untuk barang dan jasa.

Dalam hal geografis, Nurkse juga tidak mendukung pernyataan bahwa jika wilayah geografis suatu negara besar, ukuran pasarnya juga harus besar. Suatu negara yang berukuran kecil juga memiliki permintaan efektif yang besar, negara Jepang misalnya. Sebaliknya, suatu negara mungkin mencakup wilayah geografis yang sangat besar tetapi pasarnya mungkin masih kecil. Hal ini dapat terjadi jika sebagian besar negara tidak dapat dihuni, atau jika negara menderita dari tingkat produktivitas rendah dan dengan demikian memiliki Pendapatan Nasional yang rendah.

Selanjutnya, gagasan bahwa biaya transportasi dan hambatan perdagangan akan menghambat perluasan pasar adalah hal yang telah diketahui sejak lama. Nurkse menekankan bahwa tarif pajak, kontrol pertukaran, kuota

¹⁵Gaur, K.D. 1995. *Development and Planning*. University of Michigan: Sarap & Sons. Hlm. 820. ISBN 81-85431-54-X.st

impor dan hambatan non-tarif lainnya untuk perdagangan adalah hambatan utama untuk memajukan kerja sama internasional dalam mengekspor dan mengimpor.¹⁶ Lebih khusus lagi, karena biaya transportasi yang tinggi antar negara, produsen tidak memiliki insentif untuk mengekspor komoditas mereka. Akibatnya, jumlah akumulasi modal tetap kecil. Untuk mengatasi masalah ini, PBB mengeluarkan perencanaan pada tahun 1951 dengan solusi untuk negara-negara terbelakang.¹⁷ PBB menyarankan agar negara terbelakang dapat memperluas pasar mereka dengan membentuk serikat dengan negara-negara tetangga. Selain itu, mereka dapat mengadopsi sistem perpajakan istimewa atau bahkan menghapuskan bea cukai sama sekali. Logikanya adalah pada saat bea cukai dihapus, biaya transportasi akan jatuh. Akibatnya, harga akan turun dan dengan demikian permintaan akan naik.

Nurkse menekankan produktivitas sebagai penentu utama ukuran pasar. Peningkatan produktivitas (didefinisikan sebagai output per unit input) meningkatkan arus barang dan jasa dalam perekonomian. Sebagai hasil dari peningkatan ini, konsumsi juga meningkat. Oleh karena itu, ekonomi negara terbelakang harus bertujuan untuk meningkatkan tingkat produktivitas mereka di semua sektor ekonomi, khususnya pertanian dan industri. Sebagai contoh, di sebagian besar negara dengan ekonomi terbelakang, teknologi yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertanian juga terbelakang. Tingkat penyediaan alat rendah ditambah dengan ketergantungan cuaca. Sementara sebagian besar penduduk (70-80%) dapat secara

¹⁶S. K., Misra, dan V. K. Puri. 2010. *Economics Of Development And Planning—Theory And Practice (12th ed.)*. Nepal: Himalaya Publishing House. ISBN 81-8488-829-5.

¹⁷United Nations, Department of Economic Affairs Report. 1951. *Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries*. New York.

aktif bekerja di sektor pertanian, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto mungkin serendah 40%.¹⁸ Ini menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan output per unit input dan output per kepala. Hal ini dapat dilakukan jika pemerintah menyediakan fasilitas irigasi, benih varietas unggul, pestisida, pupuk, traktor, dan lain sebagainya. Hasil positif dari ini adalah petani mendapatkan lebih banyak pendapatan dan memiliki daya beli yang lebih tinggi (pendapatan riil). Permintaan mereka akan produk lain dalam ekonomi akan meningkat dan ini akan memberikan insentif kepada pelaku industri untuk berinvestasi di negara tersebut. Dengan demikian, ukuran pasar memperluas dan meningkatkan kondisi negara yang terbelakang. Jika pendapatan uang rakyat meningkat sementara tingkat harga dalam perekonomian tetap sama, ukuran pasar akan tetap tidak meluas sampai tingkat pendapatan dan produktivitas riil naik. Berikut pernyataan Nurkse lainnya

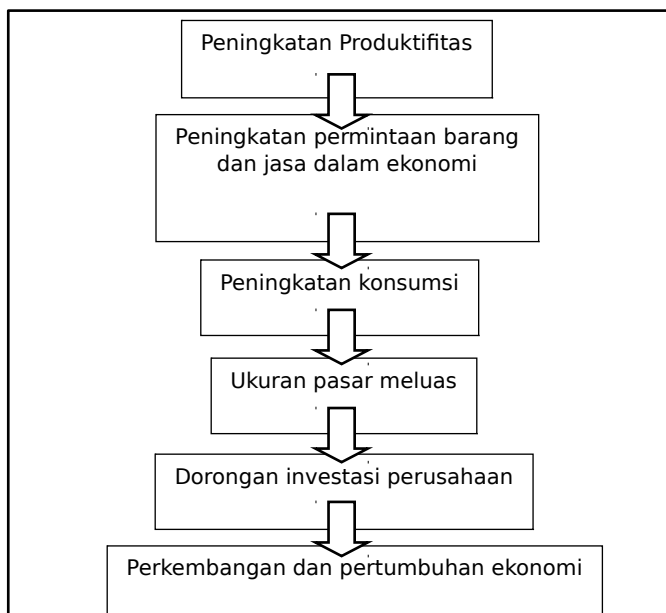
“In underdeveloped areas there is generally no 'deflationary gap' through excessive savings. Production creates its own demand, and the size of the market depends on the volume of production. In the last analysis, the market can be enlarged only through all-round increase in productivity. Capacity to buy means capacity to produce.”

Pernyataan tersebut menerangkan bahwa di daerah terbelakang umumnya tidak ada celah deflasi melalui penghematan berlebihan. Produksi menciptakan permintaannya sendiri dan ukuran pasar tergantung pada volume produksi. Dalam analisis terakhir, pasar hanya

18S. K., Misra, dan V. K. Puri. 2010. *Economics Of Development And Planning—Theory And Practice (12th ed.)*. Nepal: Himalaya Publishing House. ISBN 81-8488-829-5.

dapat diperbesar melalui peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Kapasitas untuk membeli berarti kapasitas untuk memproduksi.¹⁹ Hal ini lebih jelas diterangkan dalam gambar berikut:

Gambar 1.3.2
Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Melalui Produktifitas



¹⁹Nurkse, Ragnar. 1961. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Hlm. 163. New York: Oxford University Press.

Setelah terjadi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam negara, perlu adanya pertahanan angka naik dan turun perekonomian dalam implementasinya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebut dengan stabilitas ekonomi.

Stabilitas perekonomian adalah sebuah syarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian produktifitas bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak selalu harus dalam keseimbangan yang sangat tepat. Ketidakseimbangan fiskal dan neraca pembayaran misalnya tetap sejalan dengan stabilitas ekonomi asalkan dapat dibiayai secara berkesinambungan.

Perekonomian yang tidak stabil kedepannya akan menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyusahakan masyarakat dalam suatu negara, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Sebagaimana dalam teori pertumbuhan, tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi makro bagi kelancaran dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, pemerintah disarankan untuk terus menciptakan dan menguatkan stabilitas ekonomi makro. Salah satu arah kerangka ekonomi makro dalam jangka menengah adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mencegah timbulnya fluktuasi yang berlebihan di dalam perekonomian.

Konsep Hubungan Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Demokrasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan korelatif dan interaktif yang kuat sepanjang sejarah.²⁰ Konsep hubungan ini dikemukakan oleh beberapa pakar ekonomi, sosiolog, maupun politik. Dalam kasus demokratisasi Nepal ini penulis menggunakan beberapa jurnal maupun buku dari James A. Robinson, Seymour Martin Lipset, dan Guillermo Vuletin.

James A. Robinson dalam salah satu jurnal ekonominya yang berjudul “Economic Development and Democracy” menjelaskan beberapa teori tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dan demokrasi dalam suatu negara saling berkaitan satu sama lain. Robinson menerangkan bahwa hubungan ini telah terjadi sejak periode Yunani Kuno abad ke-4 SM dan kemudian pada periode kekaisaran Romawi menandai awal dari demokrasi dan hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat menjadi perbaikan perekonomian dan dapat pula menjadi memburuk dalam kondisi tertentu.

Perubahan positif demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam keputusan pemerintah dalam penyelesaian konflik sosial mengenai pembatasan usaha masyarakat terutama jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan otoriter. Salah satu alasan utama untuk ini adalah bahwa masyarakat, yaitu pemilih dalam demokrasi dapat mendukung perluasan usaha di dalam maupun luar negeri. Keinginan masyarakat mengenai konsep demokrasi ini berlaku di negara-negara dengan tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi. Hal inilah yang menghubungkan tingkat perkembangan suatu negara

²⁰Rivera-Batiz, Francisco L., dan Luis A. Rivera-Batiz. 2006. *Democracy, Governance And Economic Growth: Theory And Evidence in Democracy, Participation, and Economic Development: An Introduction*. Cambridge University, Massachusetts: Annual Reviews Harvard.

sebagai salah satu faktor yang menentukan untuk mengalami perubahan dan reformasi demokrasi ke arah yang lebih positif.²¹

Dorongan demokratisasi semakin kuat karena makin maraknya pemikiran bahwa negara non-demokratis yang disebut juga dengan negara diktator dikuasai dan dikendalikan oleh beberapa orang yang berada di tingkat elitis pemerintahan turun temurun dan tidak memberikan masyarakat lainnya kesempatan untuk memberikan pendapatnya dalam mengembangkan segala aspek termasuk ekonomi negaranya. Sistem diktator selalu memaksakan kekuasaan dan kendalinya atas peraturan yang dibuat oleh para elit yang berkuasa meskipun harus menggunakan kekerasan agar peraturannya dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat hanya memiliki dua pilihan yaitu mengikuti dengan terpaksa atau melakukan kerusuhan untuk menurunkan peraturan yang berlaku. Kerusuhan tidak sepenuhnya dapat meluluhkan diktator ini dalam mengganti peraturan yang berlaku, maka sistem ini sangat merugikan masyarakat luas. Menyadari keadaan ini, Nepal menjadi sangat yakin untuk mengakhiri sistem monarki demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pada tahun 2008.

Demokratisasi selalu dianggap lebih baik karena peraturan yang berlaku bersifat sementara (dapat dievaluasi setiap periode tertentu), dapat dengan mudah menggulingkan pemerintah ketika dianggap tidak kompeten, dan lebih mudah menyalurkan keinginan masyarakatnya. Demokratisasi selalu menjadi pilihan sebuah negara yang sedang berjuang untuk meredam konflik masyarakat di negara sistem diktator yang mencari peralihan sistem pemerintahan yang biasanya dimulai dari adanya masa krisis seperti kegagalan panen, depresi

²¹Gerring, John, dkk. 2011 . *Democracy, History, and Economic Performance: A Case-Study Approach*. USA: Elsevier Ltd.

ekonomi nasional maupun internasional, krisis utang negara, atau bahkan perang internal dan eksternal dengan negara lainnya. Krisis dan guncangan bidang makroekonomi seperti itu adalah kejadian yang bersifat sementara dan menyebabkan fluktuasi jangka pendek.

Terdapat pengecualian bagi beberapa negara yang perekonomiannya tidak dipengaruhi oleh keputusan sebuah negara melakukan demokratisasi. Hal ini dikemukakan oleh Guillermo Vuletin, Julia Ruiz Pozuelo, dan Amy Slipowitz dalam buku berjudul "*Democracy Does Not Cause Growth: The Importance of Endogeneity Arguments*". Demokrasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara, bahkan dapat menurunkan stabilitas ekonomi pada masa transisi maupun setelah terpenuhinya demokratisasi dalam negara tersebut. Vuletin mengadakan survei kepada 165 ahli demokrasi untuk memperkuat argumennya dan dari hasil surveinya ditemukan bahwa rata-rata negara demokrasi pada saat transisi sistem pemerintahannya ke sistem yang baru ditemukan angka pertumbuhan ekonomi di bawah angka pertumbuhan sebelumnya. Penurunan angkanya tidak hanya lebih rendah namun menurun drastis. Menghitung dari rata-rata PDB beberapa negara di dunia yang melaksanakan demokratisasi dalam waktu yang berdekatan, terdapat angka pertumbuhan PDB hanya 0,54, menurun dari angka 0,77 sebelum masa transisi terjadi. Angka ini didapatkan dengan menghitung rata-rata dari beberapa tahun pasca demokratisasi beberapa negara.

Hal inilah yang kemudian membuktikan bahwa demokratisasi tidak selalu membawa dampak yang baik bagi sebuah negara untuk membantu pertumbuhan ekonomi berjalan naik dan tidak ada pula garansi akan naik seiring berjalannya waktu. Banyak faktor yang dapat membuat demokratisasi justru membawa depresi ekonomi terjadi dalam negara transisi tersebut, seperti contoh, memilih pemimpin yang tidak kompeten, peraturan yang berubah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat luas (di mana

konsep demokrasi segalanya harus kembali pada rakyat), maupun berubahnya sifat politik ekonomi antar negara karena disebabkan efek demokratisasi terhadap pola ekonomi politik dalam sebuah negeri.

Keyakinan bahwa demokrasi berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi telah bersifat umum dalam pendidikan ekonomi politik baik secara akademis maupun dalam berbagai media pers. Penelitian Robert Barro di bidang ini menyimpulkan bahwa:

"Lebih banyak hak politik tidak berpengaruh pada pertumbuhan ... Pelajaran pertama yang perlu diketahui adalah bahwa demokrasi bukanlah kunci bagi pertumbuhan ekonomi."²²

Sementara itu, melihat dari kebangkitan ekonomi negara China, salah satu jurnalis politik ekonomi New York Times, Tom Friedman berpendapat bahwa:

“Demokrasi satu partai tentu memiliki kekurangannya. Tetapi ketika dipimpin oleh sekelompok orang yang kredibilitas tinggi, seperti halnya China saat ini, itu juga dapat memiliki keuntungan besar. Partai yang satu itu hanya dapat menerapkan kebijakan yang secara politis sulit tetapi sangat penting yang diperlukan untuk menggerakkan masyarakat ke depan di abad ke-21 [...]”

Ada beberapa kondisi untuk memperkirakan dampak demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, indeks demokrasi yang ada biasanya terdapat

²²Barro, Robert J. 1991. *Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics*. Massachusetts Avenue Cambridge: The MIT Press.

kesalahan dalam pengukuran yang cukup besar, yang mengarah ke perubahan semu dalam angka demokrasi suatu negara meskipun lembaga demokrasinya tidak benar-benar berubah. Kedua, dalam grafik di bawah ini, demokratisasi berakibat kejatuhan sementara dalam PDB pada masa transisinya.²³

Dampak demokrasi terhadap PDB di masa depan perlu dibentuk ulang dan memperkirakan dinamika prosesnya agar mencapai hasil yang baik. Bahkan dengan efek yang tetap setiap tahun dan setiap negara, perubahan demokrasi mungkin berkorelasi dengan perubahan lain atau merespon kondisi ekonomi saat ini atau masa depan, hal ini dapat meningkatkan kekhawatiran bias variabel yang jelas terjadi dalam sebuah negara.²⁴

Dari beberapa teori yang telah penulis paparkan di atas, demokrasi tidak selamanya dapat membawa sebuah negara terhadap pertumbuhan ekonomi yang maju baik pada awal transisi maupun bertahun-tahun setelah transisi. Hal ini bergantung pada kondisi pemerintahan internal negara masing-masing dan keputusan serta peraturan yang berlaku baik secara nasional maupun peraturan internasionalnya. Faktor lain juga dapat berpengaruh dalam proses pertumbuhan ekonomi negara demokratis, seperti hubungan bilateralnya dengan negara lain, pola perdagangan internasional, utang luar negeri, dan masalah makroekonomi lainnya.

23World Economic Forum. 2014. *Does democracy boost economic growth?*

<https://www.weforum.org/agenda/2014/05/democracy-boost-economic-growth/>. Diakses pada 27 November 2018.

24Robinson, James A., Acemoglu, dan Johnson. 2005. *Institutions As A Fundamental Cause Of Long-Run Growth, Handbook of Economic Growth, Volume IA*. Cambridge: Elsevier B.V.

Hal ini berlaku pula terhadap apa yang terjadi di Nepal. Beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2004 hingga 2010 hubungan bilateral antara India dan Nepal mulai goyah dari dampak perselisihan ras dan agama di bawah pengaruh sistem pemerintahan yang berubah, hingga puncaknya di tahun 2015 Nepal memutuskan untuk mengadopsi sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya yang membawa Nepal menjadi salah satu negara di mana rakyatnya bebas hidup di bawah peraturan demokrasi Nepal. Banyak faktor pasca demokratisasi Nepal yang kemudian menyebabkan India memberikan sanksi sementara bagi Nepal yaitu menghentikan segala kegiatan ekspor dan impor yang terjalin di antara dua negara tersebut. Hal ini menyebabkan drastisnya penurunan angka stabilitas ekonomi di Nepal pada tahun 2016. Ketergantungan terhadap India dalam suplai bahan mentah sangatlah besar dalam kelangsungan industri Nepal. India memiliki peran 70% dalam proses industri Nepal. Berhentinya suplai bahan mentah dan ditolakny hasil produksi Nepal masuk ke India mengakibatkan Nepal berada di krisis ekonomi paling parah sepanjang sejarah Nepal.

D. Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan sebelumnya dan menggunakan kerangka pemikiran di atas, penulis dapat berpendapat bahwa

1. Dengan menggunakan pandangan *balanced growth theory*, penelitian ini akan menunjukkan bahwa Nepal sebagai negara miskin-berkembang memaksimalkan kegiatan produksi industrinya untuk menaikkan angka pertumbuhan ekonominya. Perkembangan produksi ini diprediksi akan berjalan lebih

maksimal di bawah sistem pemerintahan yang demokratis.

2. Dari pandangan konsep hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, demokratisasi sistem pemerintahan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Nepal ke arah yang lebih baik, melainkan menyebabkan stabilitas ekonominya menurun. Hal ini dikarenakan demokratisasi memicu munculnya implikasi negatif pada hubungan bilateral Nepal.

E. Jangkauan Penelitian

Demi mencegah terjadinya pembahasan yang terlalu luas serta pembahasan di luar fokus utama, maka penulis menetapkan jangkauan waktu dari tahun 2015 hingga 2016 di mana pada tahun ini merupakan puncak dari penurunan stabilitas ekonomi Nepal akibat demokratisasi sistem pemerintahannya. Penulis juga membatasi aktor penting dalam pembahasan dengan memfokuskan pada hubungan diplomasi perdagangan Nepal dengan negara-negara kerja sama perdagangannya. Namun penulis akan tetap memasukkan tahun-tahun serta aktor lainnya di luar jangkauan yang sekiranya masih memiliki korelasi dengan jangkauan utama.

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana demokratisasi sistem pemerintahan Nepal dapat menimbulkan stabilitas ekonomi dalam negerinya menurun drastis pada tahun 2016.

G. Metode Penelitian

Dalam makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan fakta dan data dalam jangkauan yang luas dengan tujuan untuk membuat deskripsi, analisis, penjelasan, dan gambaran sistematis dan akurat berdasarkan fakta dan data yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui berbagai media hasil penelitian orang lain, tidak langsung didapatkan oleh penulis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang diharapkan dapat menunjukkan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan untuk mengkaji permasalahan penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan melalui buku dari para ahli (baik cetak maupun buku dalam bentuk *soft file*), jurnal ilmiah, laporan media, artikel, maupun berkas laporan pemerintahan terkait.

3. Cara Analisis

Cara analisis yang digunakan oleh penulis yaitu dengan cara deskriptif dan eksplanatif.

4. Objek Analisis

Objek analisis dalam penelitian ini yaitu demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi yang dalam penelitian ini adalah dampak adanya demokratisasi di Nepal pada pertumbuhan ekonominya.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian dalam lima bab dan masing-masing bab akan berisi tentang hal-hal seperti berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri latar belakang permasalahan penelitian yang menjelaskan

mengenai bagaimana hubungan politik ekonomi dalam ilmu Hubungan Internasional dan bagaimana perilaku politik ekonomi sebuah negara mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negerinya serta mengapa pertumbuhan ekonomi itu penting dalam mensejahterakan masyarakatnya. Kedua, rumusan masalah yang dibuat berdasarkan latar belakang masalah yang ada. Ketiga, kerangka dasar penelitian yakni teori pertumbuhan seimbang dan konsep hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan oleh para ahli di bidangnya. Keempat, argumen penelitian dibuat berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Kelima, metode penelitian. Keenam, ruang lingkup batasan penelitian dan terakhir sistematika penulisan penelitian.

BAB II

Pada bab ini, penulis akan membahas sejarah politik Nepal dimulai dari sistem pemerintahan yang berlaku sejak awal berdirinya wilayah Nepal, dinamika konstitusi, hingga kondisi internal dan diplomasi Nepal di bawah konstitusi terbarunya pada tahun 2015.

BAB III

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang upaya-upaya pemerintah Nepal dalam membangun perekonomian negerinya. Dimulai dari menjelaskan potensi ekonomi Nepal serta upaya perbaikan ekonomi melalui kerja sama bilateral dengan negara lainnya yang berisi tentang kapan dimulainya perjanjian antar negara dan bagaimana kondisi perjanjian antar negara kerja sama tersebut. Penulis

juga akan membahas tentang kegiatan ekspor dan impor Nepal dengan negara kerja samanya dengan melampirkan data produk ekspor dan impor di tiap negara kerja samanya.

BAB IV

Pada bab ini, membahas tentang dampak yang muncul pasca demokratisasi sistem pemerintahan dan pergantian konstitusi Nepal dalam bidang perekonomian negerinya. Pada sub bab pertama, penulis menjelaskan alasan mengapa demokrasi tidak berdampak baik bagi ekonomi di Nepal dan pada sub bab selanjutnya penulis akan menunjukkan bagaimana dampak demokrasi terhadap stabilitas ekonomi Nepal tahun 2016.

BAB V

Bab ini berisi kesimpulan penelitian penulis akan menjawab rumusan masalah dengan menggunakan kerangka pemikiran penelitian ini.